



**PEMERINTAH
KABUPATEN
SIGI**

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2025 - 2029**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Renstra-PD Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyusunannya, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 dan kami mengharapkan bahwa partisipasi tersebut tetap berlanjut dalam proses implementasinya, sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan untuk lima tahun ke depan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat mutu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, amin.

Sigi, Juli 2025

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
KABUPATEN SIGI,**

TONY W PONULELE, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19730603 199903 1 009

DAFTAR ISI

BABI PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan RenstraPD	2
1.3 Hubungan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.....	3
1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra PD	4
1.5 Sistematis Penulisan.....	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 8
2.1 Tugas,Fungsi Dan Struktur Badan Kesbangpol.....	8
2.2 Sumber Daya Badan Kesbangpol	18
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol (Capaian IKU/IKK Periode 2020-2024	23
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	25
2.5 Mitra Badan Kesbangpol	26
2.6 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Badan Kesbangpol.....	27
 BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	 32
3.1 Visi Dan Misi Pemerintah Kabupaten Sigi	32
3.2 Visi Dan Misi Badan kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sigi	35
3.3 Tujuan Dan Sasaran	37
3.4 Strategi Badan Kesbangpol Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD	41
3.5 Arah Kebijakan Badan Kesbangpol Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD	43
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	 46
4.1 Uraian Program Badan Kesbangpol	46
4.2 Uraian Kegiatan Dan Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif (2025-2029)	50

4.3 Dukungan program Badan Kesbangpol pada program prioritas pembangunan Daerah.....	88
4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol.....	129
4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kesbangpol.....	133
BAB V PENUTUP.....	136

DAFTAR TABEL

Tabel Bab II

Tabel	Struktur Organisasi	9
2.1	Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol.....	18
2.2	Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	18
2.3	Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan.....	19
2.4	Sarana dan Prasarana Kerja Badan Kesbangpol.....	22

Tabel Bab III

3.1	Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (Cascading RPJMN, RPJMD Sigi, dan Renstra Kesbangpol)	33
3.2	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Badan Kesbangpol 2025-2029	36
3.3	Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesbangpol per Sasaran	38

Tabel Bab IV

4.1	Uraian Program Badan Kesbangpol.....	47
4.2	Uraian Kegiatan dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan pagu Indikatif (2025 dan 2029)	51
4.3	Dukungan Program Badan kesbangpol terhadap program Prioritas Pembangunan Daerah (Cross-Cutting Programs)...	89
4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol.....	130
4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kesbangpol.....	134

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan esensial yang memandu arah dan langkah kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sigi selama periode lima tahun, yaitu 2025-2029. Dokumen ini dirancang untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam strategi dan program yang dapat diimplementasikan secara konkret. Penyusunan Renstra Kesbangpol ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional yang lebih luas. Hal ini selaras dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 harus dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota.¹

Keterkaitan ini menegaskan bahwa Renstra Kesbangpol merupakan mata rantai krusial dalam hierarki perencanaan pembangunan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMN, hingga RPJMD, dan selanjutnya dioperasionalkan dalam rencana kerja tahunan. Keberhasilan Renstra ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Sigi, dan pada gilirannya, mendukung target pembangunan nasional. Oleh karena itu, Renstra Kesbangpol bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan komitmen akuntabilitas terhadap pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat

Kabupaten Sigi, dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Renstra PD

Penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 berlandaskan pada kerangka hukum yang kuat dan relevan, memastikan legitimasi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum utama yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen ini mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 65 dan Pasal 264, yang mengamanatkan kepala daerah untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.¹
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Pasal 10, yang mengamanatkan penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada RPJPD.¹
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.¹
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang secara spesifik mengatur sistematika dan tata cara penyusunan Renstra PD.¹
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun

2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 125);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 150);

Lembaran

Lanskap hukum perencanaan daerah terus berkembang, ditandai dengan adanya peraturan-peraturan terbaru seperti Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang baru ditetapkan pada tahun 2025.¹ Hal ini menunjukkan bahwa Renstra ini disusun berdasarkan kerangka hukum terkini, yang menjamin relevansi dan kesesuaiannya dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Kepatuhan terhadap dasar hukum ini memastikan bahwa setiap langkah strategis yang dirumuskan dalam Renstra Kesbangpol memiliki landasan legal yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.3 Hubungan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 dirancang sebagai bagian tak terpisahkan dari ekosistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Hubungan ini bersifat hierarkis dan saling melengkapi, memastikan koherensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Secara vertikal, Renstra Kesbangpol merupakan penjabaran operasional dari RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029. RPJMD sendiri berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045 dan selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029.¹ Keterkaitan ini memastikan bahwa setiap tujuan, sasaran, strategi, dan program yang dirumuskan dalam Renstra Kesbangpol secara langsung mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta berkontribusi pada prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.

Selain itu, Renstra Kesbangpol juga memperhatikan dokumen perencanaan sektoral lainnya, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).¹ Keterpaduan dengan dokumen-dokumen ini memungkinkan Kesbangpol untuk mengintegrasikan aspek-aspek spasial dan lingkungan dalam perumusan strateginya, sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik wilayah. Peran Renstra Kesbangpol sebagai alat operasionalisasi RPJMD sangat penting, karena dokumen ini menerjemahkan kebijakan makro menjadi rencana kerja yang terperinci dan dapat ditindaklanjuti oleh Kesbangpol dalam lingkup tugas dan fungsinya. Hal ini memungkinkan Kesbangpol untuk secara aktif mengimplementasikan strategi pembangunan daerah, bukan hanya sekadar selaras, tetapi juga menjadi motor penggerak pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Sigi.

1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra PD

Penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 memiliki maksud dan tujuan yang jelas, berfokus pada peningkatan kinerja dan kontribusi optimal terhadap pembangunan daerah.

Maksud:

Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman komprehensif bagi Badan Kesbangpol Kabupaten Sigi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program serta kegiatan selama periode 2025-2029. Dokumen ini akan menjadi acuan utama bagi seluruh jajaran Kesbangpol untuk memastikan setiap upaya yang dilakukan selaras dengan visi, misi, dan program kepala daerah, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Tujuan:

Tujuan utama dari penyusunan Renstra ini adalah untuk mewujudkan kinerja yang optimal dari Badan Kesbangpol selama lima tahun ke depan. Kinerja ini akan dicapai melalui:

1. **Pemanfaatan Berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK):** Renstra ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh operasional dan pelayanan Kesbangpol dilaksanakan sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini menjamin kualitas dan standar layanan yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia.¹
2. **Kontribusi pada Sasaran RPJMD:** Dokumen ini dirancang untuk secara langsung berkontribusi pada pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sigi. Ini berarti bahwa kebermanfaatan Kesbangpol akan diukur dari dampaknya terhadap tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.¹

Penentuan tujuan Renstra PD ini mencerminkan fokus ganda: kepatuhan terhadap standar nasional dan kontribusi aktif terhadap tujuan pembangunan lokal. Kesbangpol diharapkan tidak hanya menjalankan tugasnya sesuai pedoman pusat, tetapi juga menjadi

agen perubahan yang efektif dalam mencapai visi pembangunan Kabupaten Sigi.

1.5 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika yang terstruktur, terdiri atas lima bab utama, yaitu ¹:

- **BAB I PENDAHULUAN:** Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.
- **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH:** Menguraikan tugas, fungsi, dan struktur Kesbangpol, sumber daya yang dimiliki, evaluasi kinerja pelayanan sebelumnya, identifikasi kelompok sasaran dan mitra, serta perumusan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi.
- **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN:** Menjabarkan visi dan misi Kesbangpol, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkannya. Bagian ini juga akan menyajikan tabel keselarasan dan target kinerja.
- **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN:** Merinci program, kegiatan, dan subkegiatan Kesbangpol beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya, serta keterkaitannya dengan program prioritas pembangunan daerah lintas sektor. Bagian ini juga akan memuat indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK).

- **BAB V PENUTUP:** Berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

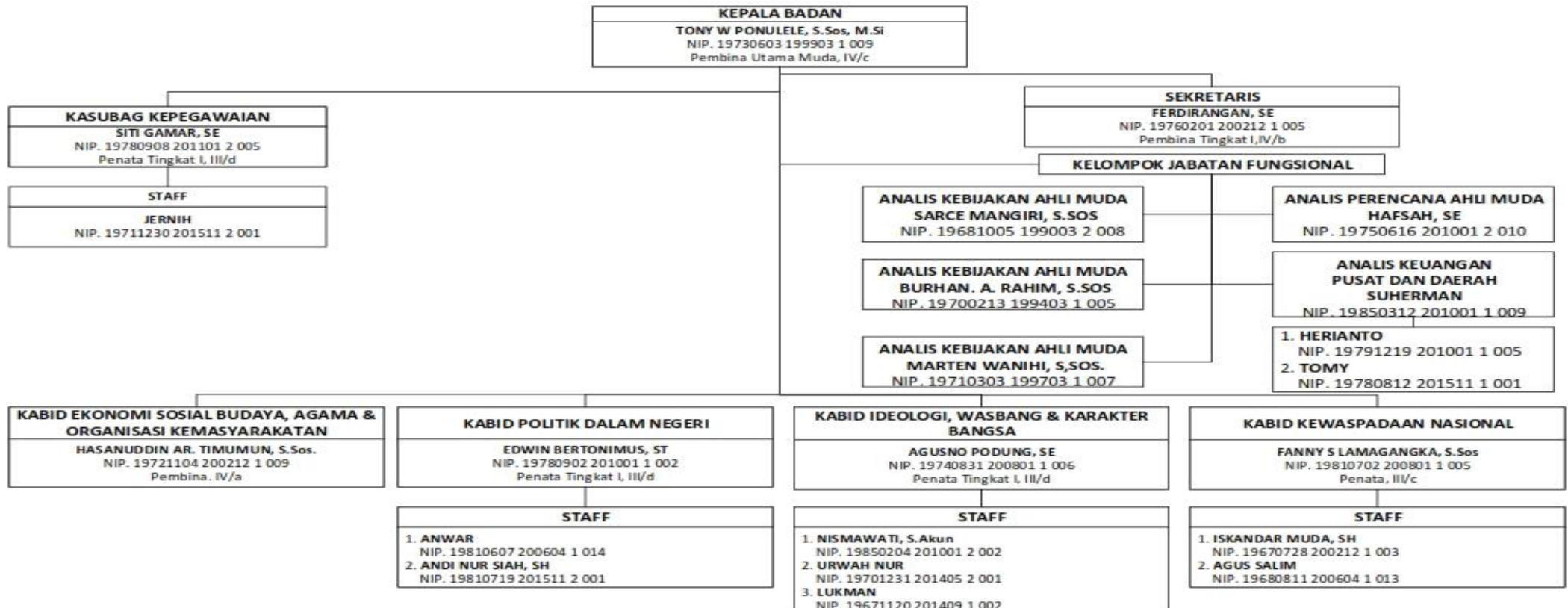
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Kesbangpol

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sigi menyebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sigi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah. Berikut Susunan **Struktur Organisasi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik :**

STRUKTUR ORGANISASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIGI



2.1.1 KEPALA BADAN

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan lingkup urusan dan wewenangnya

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pada satuan kerja badan kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan tugas dilingkungan badan kesatuan bangsa dan politik;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Menyiapkan kebijakan pemerintah daerah di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan pranata sosial budaya, bidang kewaspadaan dan penanganan konflik, bidang organisasi politik dan ketahanan ekonomi dan kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan pranata sosial budaya, bidang kewaspadaan dan penanganan konflik, bidang organisasi politik dan ketahanan ekonomi dan kemasyarakatan;
- f. Perumusan standar, norma, pedoman/juknis, kriteria dan prosedur di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan pranata sosial budaya, bidang kewaspadaan dan penanganan

konflik, bidang organisasi politik dan ketahanan ekonomi dan kemasyarakatan;

- g. Pemberian bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan, pengawasan dan evaluasi;
- h. Pengelolaan urusan ketatausahaan dan pelaksanaan administrasi;
- i. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sekretaris

- Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretaris Badan mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas badan kesatuan bangsa dan politik memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik;
- b. Perumusan perencanaan dan program serta penyiapan rancangan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan perlengkapan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan kantor;

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

Sekertariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas:
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan badan;
- c. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) ,
- d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) badan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja dan pelaksanaan tugas bidang – bidang secara terpadu;
- f. Mengumpulkan, mengelola dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara terintegrasi dengan bidang – bidang yang ada;
- g. Menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara insidentil dan berkala;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

Sub Bagian Keuangan dan Asset, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan

- serta membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undanganyangberlaku;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
 - c. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
 - b. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
 - c. Mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;

- d. Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
- e. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia(SDM) pegawai;
- f. Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
- g. Menyiapkan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

2.1.3 Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa melaksanakan tugas membina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa melaksanakan :

- 1. Penyusunan rencana kerja Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- 2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- 3. Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- 4. Pembinaan karakter bangsa;
- 5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

- **Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**

Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, dan pembauran kebangsaan melaksanakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, dan pembauran kebangsaan;
3. Pembinaan pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara;
4. Pembinaan wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; dan
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

- **Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa**

Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan karakter bangsa melaksanakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan karakter bangsa;
3. Pembinaan karakter bangsa, kesadaran bela negara dan cinta tanah air;
4. Pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa kejuangan;
5. Pembinaan dan fasilitasi toleransi dan kerukunan dalam hidup beragama; dan
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa.

2.1.4 Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional melaksanakan tugas membina politik dalam negeri dan ketahanan nasional melaksanakan :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan politik dalam negeri dan ketahanan nasional;
3. Pembinaan politik dalam negeri;
4. Pembinaan ketahanan nasional; dan
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional.

▪ **Subbidang Politik Dalam Negeri**

Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan politik dalam negeri melaksanakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Politik Dalam Negeri;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan politik dalam negeri;
3. Pembinaan kehidupan demokrasi, hak asasi manusia dan pendidikan politik;
4. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Legislatif serta pemilihan Kepala Daerah;
5. Pembinaan kelembagaan partai politik; dan
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Politik Dalam Negeri.

2.1.5 Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan penanganan konflik dan membina kewaspadaan nasional melaksanakan tugas :

1. Penyusunan rencanan kerja Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
2. Perumusan kebijakan teknis penanganan konflik dan pembinaan kewaspadaan nasional;
3. Pelaksanaan penanganan konflik;
4. Pembinaan kewaspadaan nasional;
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

▪ **Subbidang Penanganan Konflik**

Subbidang Penanganan Konflik mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan konflik melaksanakan :

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Penanganan Konflik;
2. Perumusan kebijakan teknis penanganan konflik;
3. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan konflik, dan pemulihan pasca konflik;
4. Pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama intelijen keamanan;
5. Pengoordinasian dan pembinaan masyarakat perbatasan;
6. Pemantauan daerah rawan konflik; dan
7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penanganan Konflik.

▪ **Sub bidang Kewaspadaan Nasional**

Subbidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat melaksanakan :

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Kewaspadaan Nasional;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan kewaspadaan dini masyarakat;
3. Pelaksanaan dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat;
4. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;

5. Pelayanan rekomendasi penelitian dan pengawasan penelitian; dan
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Kewaspadaan Nasional.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam aturan perundangan, kekuatan sumberdaya yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sigi sampai saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kesbangpol Kabupaten Sigi

Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Status kepegawaian	laki-laki	perempuan	jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	14	7	21
2	Tenaga Kontrak	11	3	14
	Total	25	10	35

Pada Tabel 2.1, berdasarkan data jumlah pegawai menurut status kepegawaian dan jenis kelamin, diketahui bahwa total pegawai adalah sebanyak 35 orang, terdiri dari laki-laki (71,43%) dan 10 perempuan (28,57%). Komposisi ini menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi keseluruhan pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan pangkat/golongan

No	Status kepegawaian	laki-laki	Perempuan	jumlah
----	--------------------	-----------	-----------	--------

	Golongan IV			
	IV/d			
	IV/c	1		1
	IV/b	1		1
	IV/a	2		2
	Golongan III			
	Golongan III/d	5	3	8
	Golongan III/c		1	1
	Golongan III/b		1	1
	Golongan III/a	2		2
	Golongan II			
	Golongan II/d	1		1
	Golongan II/c	1		1
	Golongan II/b	1	2	3
	Golongan II/a			
	Total	14	7	21

Pada Tabel 2.2, Golongan III merupakan golongan yang paling dominan, menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada di tahap menengah karir. Lebih rinci, mayoritas pegawai berada di Golongan III/D (23,81%), menandakan banyak pegawai telah mencapai ujung golongan ini dan menunggu promosi ke Golongan IV.

TABEL 2.3

Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN	Non ASN	jumlah
1	SMA Sederajat	7	9	16

2	D3			
3	S1	13	5	18
4	S2	1		1
5	S3			

Pada Tabel 2.3, mayoritas pegawai telah menempuh pendidikan tinggi, dengan 13 orang (37,14%) berpendidikan sarjana (S- 1) dan 1 orang (2,8%) telah melanjutkan ke jenjang pascasarjana

Efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol sangat bergantung pada ketersediaan dan optimalisasi sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya ini mencakup aspek manusia, finansial, dan infrastruktur.

Secara umum, sumber daya manusia di Kesbangpol terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kompetensi di bidang kesatuan bangsa, politik, dan keamanan. Pengembangan kapasitas ASN melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan menjadi prioritas untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mutakhir dalam menghadapi dinamika sosial-politik. Dari sisi finansial, alokasi anggaran yang memadai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kunci untuk mendukung program dan kegiatan Kesbangpol. Meskipun data spesifik tidak terinci dalam dokumen yang tersedia, penting untuk memastikan bahwa Kesbangpol memiliki dukungan anggaran yang cukup untuk menjalankan mandatnya, termasuk untuk kegiatan sosialisasi, fasilitasi, dan koordinasi. Selain itu, ketersediaan infrastruktur pendukung seperti kantor yang representatif, fasilitas pertemuan, serta peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai juga krusial untuk menunjang operasional Kesbangpol. Optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada dan pencarian peluang untuk peningkatan kapasitas akan menjadi fokus utama dalam periode Renstra ini.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sigi memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam menjaga stabilitas internal, memperkuat ideologi negara, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup kerja Kesbangpol diidentifikasi dalam dua Prioritas Nasional (PN) utama dalam RPJMN Tahun 2025-2029 ¹:

1. **Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.** Fokus arah kebijakan yang relevan meliputi penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Demokrasi dan Partisipasi Politik, Penguatan Sistem Pemilu dan Partai Politik, serta Penegakan dan Perlindungan HAM. Kesbangpol berperan aktif dalam penguatan ideologi dan karakter kebangsaan, pendidikan politik, serta fasilitasi partai politik dan penguatan demokrasi.¹
2. **Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.** Arah kebijakan yang relevan mencakup reformasi politik dan tata kelola pemilu, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, penguatan integritas dan penegakan hukum, serta penataan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam konteks ini, Kesbangpol memiliki peran dalam koordinasi dan pengawasan stabilitas politik dalam negeri, pencegahan konflik sosial dan deteksi dini ancaman ideologi negara, serta sinergi dengan lembaga keamanan dan hukum.¹

Peran Kesbangpol melampaui sekadar tugas administratif; lembaga ini menempati posisi unik sebagai garda terdepan dalam menjaga "keamanan lunak" dan memfasilitasi proses demokrasi di tingkat lokal. Mandatnya yang luas mencakup area-area sensitif seperti ideologi negara, partisipasi politik, dan kohesi sosial, yang seringkali bersinggungan dengan fungsi intelijen dan keamanan di daerah. Oleh karena itu, Kesbangpol tidak hanya bertindak sebagai pelaksana

kebijakan, tetapi juga sebagai pemantau dan pendorong dinamika sosial-politik yang sehat di Kabupaten Sigi. Struktur organisasi Kesbangpol dirancang untuk mendukung fungsi-fungsi ini, dengan unit-unit yang berfokus pada bidang ideologi, politik, kewaspadaan nasional, dan penanganan konflik sosial, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah terkait.¹

➤ **Perlengkapan (Sarana dan Prasarana)**

Untuk menunjang kelancaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sigi saat ini telah tersedia sarana dan prasarana kerja seperti terlihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sigi

No	Nama Barang	Satuan	Kondisi				Jumlah	Keterangan
			Baik	Kurang Baik	Rusak	Hilang		
1	Kendaraan Roda 4	Unit	2				2	
2	Kendaraan Roda 2	Unit	17			1	16	Hilang Tertimbun Pasca Gempa
3	laptop	Unit	12		5	1	18	5 hilang karena Gempa dan 1 rusak berat
4	Papan Nama Instansi	Unit				1	1	Hilang karena Grmpa
5	AC Split	Unit	6	1	1		8	1 rusak berat dan 1rusak ringan
6	Sound Sistem	Unit	1				1	
7	Kamera Video	Unit			1		1	1 Rusak berat
8	Tiang Bendera	Unit	1				1	
9	Dispenser	Unit	1				1	
10	Handy Cam	Unit			2		2	Rusak berat
11	P.C Unit/Komputer PC	Unit			3	3	6	3 hilang karena gempa dan 3 rusak berat
12	Televisi	Unit			2		2	Rusak Berat

13	Hardisk	Unit	1			2		2 hilang karena gempa
14	Printer	Unit	6		2		8	2 Rusak berat
15	Monitor	Unit	1				1	
16	UPS	Unit		1	3		4	3 rusak berat dan 1 Rusak Ringan
17	Meja Pejabat Eselon 2	Unit	1				1	
18	Meja Pejabat Eselon 3	Unit	3				3	
19	Kursi Tamu Pejabat 2	Unit	1				1	
20	Lemari Arsip	Unit	3	2			5	2 Rusak ringan
21	Proyektor	Unit			1	1	2	1 hilang karena gempa dan 1 Rusak Berat
22	Kipas Angin	Unit			3	1	4	1 hilang karena gempa dan 3 Rusak Berat
23	Meja Rapat	Unit	1				1	
24	Meja Biro	Unit	4				4	
25	Kursi Lipat	Unit		2	3		5	Rusak berat
26	Kursi Putar	Unit			2		2	Rusak berat
27	Genset	Unit				1	1	1 hilang karena gempa
28	Mesin Absensi Merek Secure	Unit	1				1	

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol (Capaian IKU/IKK periode 2020-2024)

Evaluasi kinerja pelayanan Badan Kesbangpol pada periode sebelumnya (2020-2024) menjadi dasar penting dalam perumusan Renstra 2025-2029. Meskipun data capaian spesifik untuk periode tersebut tidak tersedia secara rinci, dokumen pedoman penyusunan Renstra menekankan pentingnya analisis hasil evaluasi kinerja lima tahun terakhir, terutama yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).¹

Berdasarkan data IKU dan IKK Kesbangpol yang telah ditetapkan untuk periode 2025-2030, dapat diidentifikasi area-area di mana kinerja Kesbangpol diukur. Indikator-indikator ini meliputi ¹:

- **Persentase Tingkat kesadaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila:** Mengukur pemahaman dan praktik nilai-nilai Pancasila di masyarakat.
- **Persentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam demokrasi:** Mengukur keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.
- **Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan:** Menilai jangkauan program penguatan ideologi.
- **Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik:** Mengukur efektivitas pendidikan politik bagi kader partai.
- **Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif:** Menilai tingkat keaktifan organisasi masyarakat.
- **Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan:** Menilai implementasi kebijakan terkait ketahanan sosial dan pencegahan masalah sosial.
- **Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan:** Mengukur efektivitas penanganan konflik.

Indikator-indikator ini, meskipun kuantitatif, mencerminkan konsep-konsep sosial yang kompleks dan seringkali bersifat kualitatif. Misalnya, mengukur "kesadaran Pancasila" atau "etika politik" memerlukan metodologi survei yang kuat dan komprehensif untuk menangkap nuansa perubahan perilaku dan persepsi masyarakat. Tantangan dalam mengukur hasil-hasil yang bersifat "lunak" ini berarti bahwa pencapaian target numerik harus didukung oleh pemahaman mendalam tentang dampak kualitatif dari intervensi

Kesbangpol. Oleh karena itu, evaluasi kinerja di masa depan perlu mempertimbangkan tidak hanya angka, tetapi juga narasi dan studi kasus yang menunjukkan keberhasilan dalam membangun kohesi sosial dan stabilitas.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Badan Kesbangpol Kabupaten Sigi mencakup beragam elemen masyarakat dan institusi yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan Kesbangpol. Identifikasi kelompok sasaran ini penting untuk memastikan relevansi dan efektivitas intervensi yang dilakukan.¹

Kelompok sasaran utama meliputi:

- **Masyarakat Umum:** Seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sigi, dengan fokus pada peningkatan kesadaran ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan partisipasi dalam kehidupan demokrasi.
- **Pemuda:** Generasi muda sebagai agen perubahan dan penerus bangsa, dengan penekanan pada pendidikan politik, pembentukan karakter kebangsaan, dan pencegahan radikalisme.
- **Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas):** Fasilitasi dan pembinaan untuk meningkatkan peran serta dalam demokrasi, etika politik, serta ketertiban organisasi.
- **Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat:** Sebagai figur sentral dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dan memediasi konflik sosial.
- **Lembaga Keamanan dan Penegak Hukum (TNI/Polri):** Sinergi dan koordinasi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, serta deteksi dini ancaman ideologi negara.

- **Lembaga Pendidikan:** Sekolah dan perguruan tinggi sebagai media penyebaran nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM.
- **Kelompok Rentan:** Termasuk masyarakat yang berpotensi menjadi korban penyalahgunaan narkoba, judi, atau penyelundupan, serta kelompok yang rentan terhadap konflik sosial.

2.5 Mitra Badan Kesbangpol

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang kompleks, Badan Kesbangpol Kabupaten Sigi tidak dapat bekerja sendiri. Kemitraan dengan berbagai pihak menjadi kunci untuk mencapai tujuan strategis secara efektif dan efisien.¹ Mitra-mitra strategis Kesbangpol meliputi:

- **Pemerintah Pusat:** Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan lembaga terkait lainnya dalam kerangka penyelarasan kebijakan dan program nasional.
- **Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah:** Kesbangpol Provinsi dan perangkat daerah provinsi lainnya untuk koordinasi dan sinergi program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan stabilitas politik dan sosial di tingkat regional.
- **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi:** Sebagai mitra dalam perumusan kebijakan daerah, pengawasan, dan fasilitasi aspirasi masyarakat.
- **Partai Politik:** Dalam konteks pendidikan politik, fasilitasi partisipasi, dan penguatan sistem demokrasi.
- **Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):** Sebagai agen pembangunan di tingkat akar rumput, mitra dalam pemberdayaan masyarakat, pencegahan konflik, dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan.

- **Lembaga Pendidikan (Sekolah dan Perguruan Tinggi):** Dalam pengembangan kurikulum wawasan kebangsaan, pendidikan politik, dan riset terkait isu-isu sosial-politik.
- **Tokoh Agama dan Tokoh Adat:** Dalam upaya menjaga kerukunan antarumat beragama, memediasi konflik, dan melestarikan kearifan lokal.
- **Aparat Keamanan (TNI dan Polri):** Dalam koordinasi pengawasan stabilitas politik, deteksi dini ancaman, dan penanganan konflik sosial.
- **Media Massa:** Sebagai sarana diseminasi informasi, edukasi publik, dan peningkatan kewaspadaan nasional.

Kemitraan ini memungkinkan Kesbangpol untuk mengoptimalkan sumber daya, memperluas jangkauan program, dan membangun sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan di Kabupaten Sigi.

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis pelayanan Perangkat daerah (PD)

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan pelayanan Kesbangpol didasarkan pada kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal yang seharusnya tercapai, dengan mempertimbangkan dinamika sosial-politik di Kabupaten Sigi. Permasalahan ini dirumuskan dari evaluasi kinerja sebelumnya, rancangan awal RPJMD, laporan KLHS, serta aspirasi masyarakat.¹

Beberapa permasalahan dominan yang dihadapi Kesbangpol meliputi:

1. **Rendahnya Tingkat Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Pancasila:** Meskipun Pancasila adalah ideologi negara, implementasi nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih menghadapi tantangan. Hal ini dapat dilihat dari adanya potensi konflik sosial, kurangnya toleransi, atau

penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Strategi RPJMD Sigi untuk "Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM" pada Tahap I (2026) masih berfokus pada pemetaan pemahaman masyarakat dan pengembangan materi sosialisasi¹, yang mengindikasikan bahwa ini masih menjadi area permasalahan.

2. **Partisipasi Masyarakat dalam Proses Demokrasi yang Belum Optimal:** Meskipun telah ada upaya pendidikan politik, tingkat partisipasi yang berkualitas, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pembangunan, mungkin belum mencapai potensi maksimal. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya literasi politik, apatisme, atau hambatan akses informasi.
3. **Potensi Konflik Sosial dan Ancaman Ideologi Negara:** Kabupaten Sigi, seperti daerah lain, tidak luput dari potensi konflik sosial yang dapat dipicu oleh isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), sengketa lahan, atau kesenjangan ekonomi. Strategi RPJMD Sigi untuk "Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat" pada Tahap I (2026) masih mengidentifikasi kebutuhan pemetaan kondisi sosial dan potensi konflik¹, menunjukkan bahwa ini adalah masalah berkelanjutan. Selain itu, adanya ancaman ideologi transnasional atau radikalisme juga menjadi perhatian.
4. **Tantangan dalam Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan:** Masih terdapat organisasi kemasyarakatan yang belum tertib administrasi, kurang aktif, atau bahkan berpotensi menyimpang dari tujuan kebangsaan. Hal ini memerlukan upaya pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif.
5. **Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas dalam Penanganan Isu Kompleks:** Isu-isu seperti penyalahgunaan

narkotika, judi, dan penyelundupan memerlukan pendekatan multidimensional dan kapasitas yang memadai, yang mungkin belum sepenuhnya terpenuhi di tingkat lokal.

Permasalahan-permasalahan ini tidak hanya bersifat operasional Kesbangpol, tetapi juga berakar pada dinamika sosial-politik yang lebih dalam di Kabupaten Sigi. Misalnya, adanya kondisi sosial dan potensi konflik yang masih perlu dipetakan menunjukkan bahwa Kesbangpol menghadapi tantangan yang melekat pada realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, solusi yang dirumuskan harus bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

b. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan kondisi atau hal-hal krusial yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹ Isu-isu ini berasal dari lingkungan dinamis (global, nasional, regional) dan potensi daerah.

Beberapa isu strategis yang relevan bagi Badan Kesbangpol Kabupaten Sigi meliputi:

- 1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Era Disrupsi Informasi:** Di tengah arus informasi yang masif dan cepat, termasuk penyebaran hoaks dan ideologi transnasional melalui media digital, upaya penguatan Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi semakin kompleks. Kesbangpol harus mampu menavigasi lanskap informasi digital untuk menangkal ancaman ideologi dan menjaga kohesi sosial. Isu ini terkait dengan Prioritas Nasional 1 RPJMN, yaitu "Memperkokoh Ideologi Pancasila".¹
- 2. Peningkatan Partisipasi Politik dan Demokrasi Substansial:** Isu ini berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, tidak hanya dari segi kuantitas (angka partisipasi pemilu) tetapi juga

kualitas (partisipasi yang informatif dan konstruktif). Hal ini sejalan dengan Prioritas Nasional 1 RPJMN tentang "Demokrasi dan Partisipasi Politik" serta Prioritas Nasional 7 tentang "Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu".¹

3. **Pencegahan Konflik Sosial dan Deteksi Dini Ancaman Keamanan Non-Tradisional:** Dinamika sosial yang cepat, termasuk potensi gesekan antar kelompok masyarakat, membutuhkan sistem deteksi dini dan mekanisme pencegahan konflik yang adaptif. Ancaman keamanan non-tradisional, seperti penyalahgunaan narkoba, judi online, dan penyelundupan, juga merupakan isu strategis yang memerlukan perhatian Kesbangpol, sejalan dengan Prioritas Nasional 7 RPJMN.¹ Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam dokumen Kesbangpol, isu judi online dan narkoba yang memanfaatkan platform digital merupakan bagian dari ancaman yang harus ditangani.
4. **Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI):** Isu ini menjadi program lintas sektor penting dalam RPJMD Kabupaten Sigi.¹ Kesbangpol, sebagai bagian dari program GEDSI terintegrasi, memiliki peran strategis dalam memastikan prinsip-prinsip kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan keadilan sosial terintegrasi dalam kebijakan dan layanan publik, serta dalam membangun harmoni sosial yang inklusif.¹
5. **Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pelayanan Publik dan Kewaspadaan Nasional:** Peningkatan transformasi layanan publik berbasis digital di Kabupaten Sigi¹ juga menjadi isu strategis bagi Kesbangpol. Pemanfaatan teknologi tidak hanya untuk efisiensi administrasi, tetapi juga untuk memantau dinamika sosial, menyebarkan informasi positif, dan menangkal ancaman siber yang dapat memecah belah persatuan. Isu strategis ini menekankan bahwa Kesbangpol perlu beradaptasi

dengan era digital untuk menjalankan fungsinya secara lebih efektif.

Isu-isu strategis ini saling terkait. Misalnya, penyebaran informasi yang salah secara daring dapat memperburuk potensi konflik sosial atau mengancam ideologi negara. Oleh karena itu, Kesbangpol harus mengembangkan strategi yang holistik dan adaptif, termasuk penguatan literasi digital masyarakat dan kolaborasi dengan lembaga keamanan siber, untuk menjaga stabilitas dan harmoni di Kabupaten Sigi.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

3.1 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sigi

Visi Pemerintah Kabupaten Sigi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang juga merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 adalah:

"KABUPATEN SIGI MAJU, BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA"

Misi Pemerintah Kabupaten Sigi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sigi menetapkan 5 (lima) Misi, dengan dua misi yang secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol:

Misi 4: "MEWUJUDKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP, KETAHANAN BENCANA DAN HARMONI SOSIAL".

Misi 5: "MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF".

TABEL 3.1 Sebagai Berikut :

TABEL 3.1

Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (Cascading RPJMN, RPJMD Sigi, dan Renstra Kesbangpol)

RPJMN (Asta Cita / Prioritas Nasional)	Misi RPJMD Kabupate n Sigi	Tujuan RPJMD Kabupate n Sigi	Sasaran RPJMD Kabupaten Sigi	Visi Badan Kesbangpol (Proposed)	Misi Badan Kesbangpol	Tujuan Badan Kesbangpol	Sasaran Badan Kesbangpol
PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM ¹	Misi 4: Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, ketahanan bencana dan harmoni sosial ¹	Tujuan 4.3: Meningkatkan harmoni sosial ¹	Sasaran 4.3.1: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat ¹	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sigi yang berlandaskan Pancasila, demokratis, dan harmonis dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.	Misi 5: Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif ¹	Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM ¹	Meningkatnya kesadaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila ¹
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan	Misi 5: Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang transparan dan	Tujuan 5.1: Meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan dan	Sasaran 4.3.2: Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaska				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi ¹

Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	partisipatif ¹	akuntabel dengan partisipasi aktif masyarakat	n Pancasila, demokrasi dan HAM ¹				
PN8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama ¹			Sasaran 4.3.3: Meningkatkan harmoni sosial secara inklusif ¹				
			Sasaran 5.1.12: Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM ¹				

3.2 Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sigi

Visi Badan Kesbangpol Kabupaten Sigi

- **Visi Badan Kesbangpol Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan Visi RPJMD Kabupaten Sigi.**

"Terwujudnya Ketahanan Ideologi, Politik, dan Integrasi Sosial untuk Mendukung Kabupaten Sigi Maju, Berkelanjutan, Berbasis Pertanian dan Pariwisata." ⁶

Misi Badan Kesbangpol Kabupaten Sigi

Untuk mencapai visi tersebut, Badan Kesbangpol menetapkan 5 (lima) misi yang selaras dengan Misi 4 dan Misi 5 RPJMD Kabupaten Sigi⁷:

- Memantapkan Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan⁸.
- Menjamin Stabilitas Politik dan Kehidupan Demokrasi yang Berkualitas.
- Memperkuat Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial¹⁰.
- Membangun Harmoni Sosial dan Kerukunan Antarumat Beragama dan Suku¹¹.
- Mendorong Kolaborasi Lintas Sektor dan Inovasi Tata Kelola Urusan Politik dan Kesatuan Bangsa¹².

Adapun **Tabel 3.2** Sebagai Berikut :

Tabel 3.2: Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Badan Kesbangpol 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2025	Target Kinerja 2026	Target Kinerja 2027	Target Kinerja 2028	Target Kinerja 2029	Keterangan
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif ¹	Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM ¹	Meningkatnya kesadaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila ¹	Persentase Tingkat kesadaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila ¹	Persentase	0.72	0.74	0.76	0.78	0.80	Progresi moderat, fokus pada edukasi dan fasilitasi berkelanjutan ¹
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi ¹	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam demokrasi ¹	Persentase	0.75	0.77	0.79	0.81	0.83	Progresi realistis, didukung pendidikan politik dan pemberdayaan ormas ¹

3.3 Tujuan dan Sasaran

- Tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol Kabupaten Sigi disusun untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran ini terbagi ke dalam indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) dengan target yang terukur. Berikut **Tabel 3.3** :

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN
TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN
AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH
KABUPATEN SIGI**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
8.01.0.00.0.00.05.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											
- Meningkatkan Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila.Demokrasi dan HAM	Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM		Indeks Demokrasi Indonesia	84	84	86,5	89	91,5	94	96,5	
		Meningkatnya kesadaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat .	Persentase masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (%)	72	72	74	76	78	80	82	
		Meningkatnya efektifitas administrasi kesekretariatan	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	

Tujuan dan Sasaran (berdasarkan IKU)

- **Tujuan: Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM¹³.**

Sasaran:

Meningkatnya kesadaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila¹⁴.

- *Indikator: Persentase Tingkat kesadaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari*
- *Target (2025-2029): 0.72% (2025), 0.74% (2026), 0.76% (2027), 0.78% (2028), 0.80% (2029)¹⁶.*
- *Sasaran dan Indikator Program (berdasarkan IKK)*
- *Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan ²⁰*
- *Sasaran: Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan²¹.*
- *Indikator: Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan²².*
- *Target (2025-2029): 0.65% (2025), 0.7% (2026), 0.75% (2027), 0.8% (2028), 0.85% (2029)²³.*
- *Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan*
- *Sasaran: Meningkatnya etika dan budaya politik²⁵.*
- *Indikator: Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik²⁶.*
- *Target (2025-2029): 0.7% (2025), 0.75% (2026), 0.8% (2027), 0.85% (2028), 0.9% (2029)²⁷.*
- *Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan ²⁸*
- *Sasaran: Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan²⁹.*

- *Indikator: Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif*³⁰.
- *Target (2025-2029): 0.6% (2025), 0.65% (2026), 0.7% (2027), 0.75% (2028), 0.8% (2029)*³¹.
- *Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya* ³²
- *Sasaran: Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat*³³.
- *Indikator: Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Kerukunan Umat Beragama yang Dilaksanakan*³⁴.
- Target (2025-2029): 0.8% (2025), 0.85% (2026), 0.88% (2027), 0.9% (2028), 0.92% (2029)*³⁵.
- *Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial* ³⁶
- *Sasaran: Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan*³⁷.
- *Indikator: Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan*³⁸.
- *Target (2025-2029): 0.9% (2025), 0.92% (2026), 0.94% (2027), 0.96% (2028), 0.98% (2029)*³⁹.
- *Keterangan: Progresi realistis, didukung pendidikan politik dan pemberdayaan ormas.*

Penetapan target ini, meskipun bersifat kuantitatif dalam bentuk persentase, mengukur konsep-konsep sosial yang kompleks seperti "kesadaran" dan "partisipasi". Pencapaian angka-angka ini memerlukan intervensi kualitatif yang mendalam dan upaya berkelanjutan, bukan hanya kegiatan sporadis. Misalnya, untuk meningkatkan kesadaran Pancasila, diperlukan tidak hanya sosialisasi, tetapi juga integrasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.

Metode pengukuran yang kuat, seperti survei persepsi dan studi kualitatif, akan krusial untuk secara akurat menangkap dampak dari upaya-upaya ini.

3.4 Strategi Badan Kesbangpol dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Strategi Badan Kesbangpol merupakan rencana tindakan komprehensif yang berisi langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan, termasuk optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan, untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dalam lingkungan yang dinamis.¹ Strategi ini diadaptasi dari strategi RPJMD Kabupaten Sigi yang relevan dengan tugas dan fungsi Kesbangpol.

Berikut adalah strategi utama Kesbangpol untuk mencapai sasaran:

Untuk Sasaran: Meningkatnya kesadaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila

Strategi ini berfokus pada upaya edukasi, internalisasi, dan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

- **Tahap I (2026): Pemetaan dan Perencanaan Edukasi Ideologi.** Melakukan pemetaan pemahaman masyarakat Kabupaten Sigi mengenai Pancasila, demokrasi, dan HAM. Berdasarkan hasil pemetaan, menyusun kurikulum dan materi sosialisasi yang relevan dengan konteks lokal untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai tersebut di kalangan pelajar, masyarakat umum, dan lembaga sosial.¹
- **Tahap II (2027): Implementasi Program Pendidikan dan Sosialisasi Berjenjang.** Melaksanakan program pendidikan mengenai Pancasila, demokrasi, dan HAM di sekolah-sekolah (mulai dari tingkat dasar hingga menengah) serta di lembaga-lembaga komunitas. Program ini mencakup pelatihan bagi guru dan fasilitator agar dapat mengajarkan nilai-nilai ini secara efektif kepada generasi muda dan masyarakat.¹

- **Tahap III (2028): Penguatan Forum Dialog dan Diskusi Publik.** Mengadakan seminar, diskusi publik, dan forum dialog antar berbagai kelompok masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya Pancasila, demokrasi, dan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat, untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.¹
- **Tahap IV (2029): Integrasi Nilai dalam Kebijakan dan Program Pemerintah.** Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM ke dalam kebijakan publik dan program pemerintah di Kabupaten Sigi. Memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah dan pengambil kebijakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ini diterapkan dalam pembuatan keputusan dan pelayanan publik.¹

Untuk Sasaran: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi

Strategi ini menekankan pada penguatan partisipasi publik dan pengelolaan konflik sosial untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi demokrasi.

- **Tahap I (2026): Pemetaan Kondisi Sosial dan Pengembangan Program Edukasi Harmoni.** Melakukan pemetaan terhadap kondisi sosial dan potensi konflik di Kabupaten Sigi, serta mengidentifikasi kelompok-kelompok yang perlu dilibatkan dalam program edukasi. Menyusun program edukasi yang fokus pada nilai-nilai toleransi, harmoni, dan keberagaman yang sesuai dengan kondisi lokal.¹
- **Tahap II (2027): Pelaksanaan Pelatihan dan Lokakarya Toleransi.** Menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan lokakarya yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat untuk memperkenalkan konsep-konsep toleransi, kerukunan antar umat beragama, dan penghargaan terhadap

keberagaman. Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memberikan materi yang relevan.¹

- **Tahap III (2028): Pembangunan Mekanisme Resolusi Konflik dan Mediasi Sosial.** Membangun dan memperkuat mekanisme resolusi konflik yang melibatkan fasilitator lokal dan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara damai. Mengembangkan sistem mediasi sosial yang mudah diakses oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara konstruktif.¹
- **Tahap IV (2029): Mendorong Partisipasi Komunitas dalam Kegiatan Sosial.** Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial yang mempererat hubungan antar kelompok, seperti acara budaya, gotong royong, dan dialog antar agama. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersamaan dan harmoni untuk mencegah terjadinya konflik sosial.¹

Pendekatan strategis ini menunjukkan upaya multi-aspek yang melibatkan edukasi, fasilitasi, integrasi, dan kolaborasi. Ini bukan hanya tentang penyampaian informasi, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang memungkinkan perubahan perilaku dan penguatan kohesi sosial. Misalnya, untuk meningkatkan kesadaran Pancasila, tidak cukup hanya dengan pendidikan langsung, tetapi juga melalui integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan lokal dan kolaborasi erat dengan pemimpin komunitas. Pendekatan ini memastikan bahwa Kesbangpol tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dan katalisator perubahan sosial yang positif.

3.5 Arah Kebijakan Badan Kesbangpol dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Arah kebijakan Badan Kesbangpol merupakan rangkaian kerja yang mengoperasionalkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi Kesbangpol, serta selaras

dengan strategi RPJMD, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD.¹

Berikut adalah arah kebijakan utama Kesbangpol:

1. **Peningkatan Sosialisasi dan Pendidikan Pancasila, Demokrasi, dan HAM:** Kebijakan ini akan berfokus pada implementasi program edukasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM di berbagai tingkatan, mulai dari sekolah, komunitas, hingga lembaga sosial. Tujuannya adalah untuk memperkuat pemahaman dan praktik kehidupan bermasyarakat yang adil, demokratis, dan menghormati HAM, yang pada akhirnya akan meningkatkan harmoni sosial.¹ Operasionalisasi kebijakan ini juga akan mengacu pada NSPK terkait kurikulum pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dari pemerintah pusat.
2. **Penguatan Edukasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Toleransi dan Resolusi Konflik:** Arah kebijakan ini akan meningkatkan program edukasi tentang toleransi, harmoni, dan keberagaman melalui pelatihan, seminar, dan berbagai kegiatan sosial yang melibatkan beragam kelompok masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga akan fokus pada pembangunan mekanisme resolusi konflik yang efektif untuk menjaga harmoni sosial.¹ Kebijakan ini akan diselaraskan dengan pedoman nasional tentang penanganan konflik sosial.
3. **Fasilitasi Dialog Antar Agama dan Budaya:** Kebijakan ini akan mendorong penyelenggaraan forum dialog antarumat beragama dan antarbudaya untuk meningkatkan pemahaman, saling menghormati, dan memperkuat hubungan antar kelompok masyarakat. Tujuannya adalah untuk membangun kerukunan antarumat beragama yang kokoh di Kabupaten Sigi.¹ Kebijakan ini akan dioperasionalkan dengan berpedoman pada NSPK terkait fasilitasi kerukunan umat beragama.

4. Pemberdayaan Komunitas melalui Kegiatan Sosial Bersama:

Arah kebijakan ini akan mendorong penyelenggaraan kegiatan sosial bersama yang melibatkan seluruh kelompok masyarakat, seperti gotong royong, seni budaya, dan olahraga. Tujuannya adalah untuk mempererat hubungan antar warga dan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam keberagaman.¹ Kebijakan ini akan didukung oleh NSPK terkait pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.

Arah kebijakan ini berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan makro dan praktik di lapangan. Setiap arah kebijakan tidak hanya mengulang tujuan dari RPJMD, tetapi juga mengisyaratkan bagaimana hal tersebut akan dioperasionisasikan melalui standar dan prosedur nasional yang relevan dengan fungsi Kesbangpol. Hal ini memastikan bahwa upaya Kesbangpol tidak hanya selaras dengan visi daerah, tetapi juga konsisten dengan kerangka kerja nasional.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program Badan Kesbangpol

Program-program Badan Kesbangpol Kabupaten Sigi dirancang sebagai instrumen utama untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Program-program ini merupakan kumpulan seluruh inisiatif yang akan dilaksanakan oleh Kesbangpol. Berikut Uraian **Tabel 4.1** Sebagai Berikut :

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIGI**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.588.832.000,00		4.680.608.640,00		7.774.220.813,00		4.869.705.229,00		4.967.099.334,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.837.112.703,00		2.893.854.957,00		5.951.732.056,00		3.010.766.697,00		3.070.982.031,00	
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	2.837.112.703,00	100	2.893.854.957,00	100	5.951.732.056,00	100	3.010.766.697,00	100	3.070.982.031,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					724.000.000,00		738.480.000,00		753.249.600,00		768.314.592,00		783.680.884,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	70	70	75	724.000.000,00	80	738.480.000,00	85	753.249.600,00	90	768.314.592,00	100	783.680.884,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					302.324.877,00		308.371.375,00		314.538.802,00		320.829.578,00		327.246.170,00	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	60	60	65	302.324.877,00	70	308.371.375,00	75	314.538.802,00	80	320.829.578,00	85	327.246.170,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					100.000.000,00		102.000.000,00		104.040.000,00		106.120.800,00		108.243.216,00	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	80	80	85	100.000.000,00	90	102.000.000,00	100	104.040.000,00	100	106.120.800,00	100	108.243.216,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					100.000.000,00		102.000.000,00		104.040.000,00		106.120.800,00		108.243.216,00	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang	65	65	70	100.000.000,00	80	102.000.000,00	90	104.040.000,00	100	106.120.800,00	100	108.243.216,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

	Dilaksanakan (Persentase)													
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					525.394.420,00		535.902.308,00		546.620.355,00		557.552.762,00		568.703.817,00	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	90	90	95	525.394.420,00	100	535.902.308,00	100	546.620.355,00	100	557.552.762,00	100	568.703.817,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTAL KESELURUHAN					4588832000.00		4680608640.00		7774220813.00		4869705229.00		4967099334.00	

Berikut adalah program-program utama Badan Kesbangpol:

1. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan:** Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila serta pembentukan karakter kebangsaan di kalangan masyarakat Kabupaten Sigi.¹
2. **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik:** Program ini berfokus pada peningkatan etika dan budaya politik, terutama melalui pendidikan politik bagi kader partai politik dan pemuda di lembaga pendidikan.¹
3. **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan:** Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan keaktifan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Sigi melalui fasilitasi dan pembinaan.¹
4. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya:** Program ini ditujukan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.¹ Program ini menunjukkan perluasan cakupan Kesbangpol yang melampaui urusan politik tradisional, menyentuh aspek ketahanan ekonomi dan sosial. Hal ini sejalan dengan Prioritas Nasional 2 RPJMN yang menekankan kemandirian bangsa melalui berbagai aspek ekonomi¹, yang menunjukkan pemahaman bahwa stabilitas sosial dan politik sangat terkait dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

5. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial:** Program ini berupaya meningkatkan penanganan konflik sosial yang diselesaikan dan memperkuat kewaspadaan nasional di Kabupaten Sigi.¹

4.2 Uraian Kegiatan dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif (2025-2029)

Uraian ini merinci bagaimana setiap program akan diimplementasikan melalui kegiatan dan subkegiatan spesifik, yang merupakan hasil penurunan dari tujuan dan sasaran.¹ Target kinerja untuk setiap indikator akan diproyeksikan hingga tahun 2029, dengan tahun 2030 sebagai tahun transisi untuk kesinambungan perencanaan.¹ Pagu indikatif akan ditentukan berdasarkan alokasi anggaran yang akan ditetapkan, berikut uraian **Tabel 4.2** sebagai berikut:

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
8.01.0.00.0.00.05.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
- Meningkatnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila Demokrasi dan HAM	Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM				Indeks Demokrasi Indonesia (Indeks)		
		Meningkatnya kesadaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.			Persentase masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (%)		
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	5.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
				Tersusunnya dokumen program kegiatan teknis Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Beregara (Keluarga)	5.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	5.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	5.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Paskibraka (Orang)	5.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Pumapaskibraka (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	5.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	5.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Pumapaskibraka (Dokumen)	5.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Pumapaskibraka	
					Jumlah Paskibraka (Orang)	5.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka	
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Tersusunnya Dokumen program kegiatan teknis Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	5.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	5.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	5.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	5.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	5.01.03.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	5.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	5.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Meningkatnya ketertarikan organisasi kemasyarakatan		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	5.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Tersusnya Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	5.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	5.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	5.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	5.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	5.01.04.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	5.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	5.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	5.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	5.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
				Tersusunnya dokumen Program kegiatan teknis Bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	5.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	5.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	5.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	5.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	5.01.05.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	5.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	5.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	5.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	5.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
				Tersusunnya dokumen Program kegiatan teknis Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	5.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	5.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	5.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	5.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	5.01.06.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	5.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	5.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	5.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya efektifitas administrasi kesekretariatan			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan		Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawalan (%)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	5.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2

**Rencana Pgogram/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra kesbangpol Kabupaten Sigi
Tahun 2026-2030**

Bidang Urusan Program/outcome/Kegiatan/Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2025	Target dan Pagu Indikatif tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan												
	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.200.000.000	65	1.224.000.000,00	70	1.248.480.000,00	75	1.273.449.600,00	80	1.298.918.592,00	85	1.324.896.963,84	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tersusunnya Program kegiatan Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik		1		1		1		1		1		

Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		1		1		1		1		1		
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		50		60		70		80		90		
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan												

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		4		6		8		8		8		
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1		1		1		1		1		
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		1		1		1		1		1		
Pengangkatan Purnapaskibraka Pancasila Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila												

Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka		1		1		1		1		1		
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka		1		1		1		1		1		
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		1		1		1		1		1		
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		1		1		1		1		1		
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka		42		42		42		42		42		
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Meningkatnya etika dan budaya politik												
	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	564.710.000,00	70	576.004.200,00	75	587.524.284,00	80	599.274.769,68	85	611.260.265,07	90	623.485.470,30	

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	Tersusunnya Program kegiatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik		10		12		13		14		16		
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		1		1		1		1		1		

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.	Jumlah Dokumen Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang disusun.		1		1		1		1		1		
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		50		60		70		80		90		

Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		4		4		4		6		8	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1		1		1		1		1	
Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan.	Jumlah Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan yang dilaksanakan											

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan												
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	30.230.000,0 0	65	30.834.600,00	70	31.451.292,0 0	75	32.080.317,84	80	32.721.924,2 0	85	33.376.362,68	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Jumlah Ormas/Lsm yang terdata		24		26		28		30		32		
Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		1		1		1		1		1		
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun												

Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		50		60		70		80		80		
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		4		4		4		4		4		
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1		1	1	1		1		1		
Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan	Jumlah Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan yang dilaksanakan												
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat												

	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100.000.000,00	80	102.000.000,00	85	104.040.000,00	88	106.120.800,00	90	108.243.216,00	92	110.408.080,32	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Program kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		1		1		1		1		1		
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		1		1		1		1		1		

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		1		1		1		1		1		
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		30		40		50		60		70		
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1		1		1		1		1		
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan												
	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	711.171.000,00	90	725.394.420,00	92	739.902.308,40	94	754.700.354,57	96	769.794.361,66	98	785.190.248,89	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	Persentase laporan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di daerah		1		1		1		1		1		

Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		1		1		1		1		1		
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		1		1		1		1		1		
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		50		60		70		80		100		

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		4		4		6		6		6		
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1		1		1		1		1		
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		1		1		1		1		1		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan umum dan kepegawaian	2.781.483.042	100	2.837.112.703	100	2.893.854.957	100	2.951.732.056	100	3.010.766.697	100	3.070.982.031	100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase analisis perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai tahapan perencanaan, kecukupan dana dan akuntabilitasnya		1		1		1		1		1		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2		2		2		2		3		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1		1		1		1		1		

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1		1		1		1		1		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1		1		1		1		1		1
Penyelenggaraan Walidata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah		1		1		1		1		1		1
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase lancarnya administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1		1		1		1		1		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		20		20		20		20		20		

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD		1		1		1		1		1		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase lancarnyaa Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100		100		100		100		100		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1		1		1		1		1		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1		1		1		1		1		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase lancarnyaa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100		100		100		100		100		
Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1		1		1		1		1		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1		1		1		1		1		

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan												
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100		100		100		100		100		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1		1		1		1		1		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2		2		2		2		2		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2		2		2		2		2		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2		2		2		2		2		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2		2	1	2		2		2		
Fasilitasi Kunjungan Tamu (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu												
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4		6		8		8		10		

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase lancarnya Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100		100		100		100		100		
Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1		1		1		1		1		
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1		1		1		1		1		
Pengadaan Mebel (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1		2		2		2		2		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1		2		2		2		2		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase lancarnya Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100		100		100		100		100		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1		1		1		1		1		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1		1		1		1		1		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1		1		1		1		1		

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase lancarnya Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100		100		100		100		100		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		16		16		16		16		16		

Target kinerja yang ditetapkan untuk program-program ini, seperti "peningkatan cakupan signifikan" dan "progresi ambisius" ¹, menunjukkan ekspektasi yang tinggi terhadap dampak yang dihasilkan. Untuk mencapai ambisi ini, kegiatan dan subkegiatan yang dirumuskan perlu mencerminkan pendekatan inovatif dan memanfaatkan efek multiplikator. Misalnya, dalam pendidikan politik, fokus pada kader partai sebagai "multiplikator utama" berarti bahwa pelatihan yang diberikan kepada mereka diharapkan akan disebarluaskan secara efektif kepada anggota partai dan masyarakat luas. Demikian pula, dalam penguatan ideologi Pancasila, penggunaan media edukasi yang inovatif dan pelatihan tokoh masyarakat akan mempercepat jangkauan dan kedalaman pemahaman. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap upaya tidak hanya menambah angka, tetapi juga menciptakan dampak berantai yang lebih besar di masyarakat.

4.3 Dukungan Program Badan Kesbangpol terhadap Program Prioritas Pembangunan Daerah (Cross-Cutting Programs)

Badan Kesbangpol Kabupaten Sigi memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program lintas sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah, meskipun tidak selalu menjadi penanggung jawab utama. Kontribusi Kesbangpol seringkali bersifat fundamental, yaitu dengan menciptakan lingkungan sosial dan politik yang stabil, harmonis, dan partisipatif, yang merupakan prasyarat bagi keberhasilan program-program pembangunan lainnya. RPJMD Kabupaten Sigi mengidentifikasi beberapa program lintas sektor utama, Berikut **Tabel 4.3** sebagai Berikut :

TABEL 4.3
INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
8.01.0.00.0.00.05.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	84	84	86,5	89	91,5	94,0	96,5	
2	Persentase masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	%	72	72	74	76	78	80	82	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	

TABEL. 4.3
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.588.832.000,00		4.680.608.640,00		7.774.220.813,00		4.869.705.229,00		4.967.099.334,00		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.837.112.703,00		2.893.854.957,00		5.951.732.056,00		3.010.766.697,00		3.070.982.031,00		
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	2.837.112.703,00	100	2.893.854.957,00	100	5.951.732.056,00	100	3.010.766.697,00	100	3.070.982.031,00	8.01.0.00.0.00.05.0 0 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00		120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2		2		2		2		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	3	75.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
8.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
8.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		

8.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
8.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		

8.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
8.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET ERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.205.512.703,00		2.231.254.957,00		2.279.132.056,00		2.338.166.697,00		2.378.382.031,00		
Tersusunnya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	1	2.205.512.703,00	1	2.231.254.957,00	1	2.279.132.056,00	1	2.338.166.697,00	1	2.378.382.031,00		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	20		20		20		20		20		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.110.512.703,00		2.136.254.957,00		2.184.132.056,00		2.243.166.697,00		2.283.382.031,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	20	2.110.512.703,00	20	2.136.254.957,00	20	2.184.132.056,00	20	2.243.166.697,00	20	2.283.382.031,00	
8.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	

8.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
8.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
8.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET ERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
8.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		

Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)													
8.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
8.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		

8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				168.600.000,00		178.600.000,00		188.600.000,00		188.600.000,00		208.600.000,00		
Terlaksananya Paket Administasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	2	168.600.000,00	2	178.600.000,00	2	188.600.000,00	2	188.600.000,00	2	208.600.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	4		6		8		8		10			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	0	1		1		1		1		1			

	Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)													
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	2		2		2		2		2			
8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00		
8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00		
8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	2	3.600.000,00	2	3.600.000,00	2	3.600.000,00	2	3.600.000,00	2	3.600.000,00		
8.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		105.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	4	65.000.000,00	6	75.000.000,00	8	85.000.000,00	8	85.000.000,00	10	105.000.000,00		
8.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
8.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85.000.000,00		106.000.000,00		3.106.000.000,00		106.000.000,00		106.000.000,00		
Terlaksananya Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	85.000.000,00	1	106.000.000,00	1	3.106.000.000,00	1	106.000.000,00	1	106.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		2		2		2		2			
8.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		

Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
8.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				5.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	5.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00		
8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	10.000.000,00	2	30.000.000,00	2	40.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
8.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		3.000.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	3.000.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				74.000.000,00		74.000.000,00		74.000.000,00		74.000.000,00		74.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET ERA
			2026	2027	2028	2029	2030							

KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT		TAHUN 2024	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		NGA N
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	74.000.000,00	1	74.000.000,00	1	74.000.000,00	1	74.000.000,00	1	74.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00		

8.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				124.000.000,00		124.000.000,00		124.000.000,00		124.000.000,00		124.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	3	124.000.000,00	3	124.000.000,00	3	124.000.000,00	3	124.000.000,00	3	124.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	18		18		18		18		18			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	0	18		18		18		18		18			

	dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)													
8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	18	50.000.000,00	18	50.000.000,00	18	50.000.000,00	18	50.000.000,00	18	50.000.000,00		
8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET ERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	18	65.000.000,00	18	65.000.000,00	18	65.000.000,00	18	65.000.000,00	18	65.000.000,00		
8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	3	4.000.000,00	3	4.000.000,00	3	4.000.000,00	3	4.000.000,00	3	4.000.000,00		
8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				724.000.000,00		738.480.000,00		753.249.600,00		768.314.592,00		783.680.884,00		
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	70	75	724.000.000,00	80	738.480.000,00	85	753.249.600,00	90	768.314.592,00	100	783.680.884,00	8.01.0.00.0.00.05.00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				724.000.000,00		738.480.000,00		753.249.600,00		768.314.592,00		783.680.884,00		
Tersusunnya dokumen program kegiatan teknis Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	0	1	724.000.000,00	1	738.480.000,00	1	753.249.600,00	1	768.314.592,00	1	783.680.884,00		

	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	0	4		6		8		8		8			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paskibraka (Orang)	0	42		42		42		42		42			
	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET ERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				5.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	0	4	5.000.000,00	6	8.000.000,00	8	10.000.000,00	8	10.000.000,00	8	10.000.000,00		
8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka				9.000.000,00		9.480.000,00		13.449.600,00		18.918.592,00		19.896.964,00		
Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	0	1	9.000.000,00	1	9.480.000,00	1	13.449.600,00	1	18.918.592,00	1	19.896.964,00		
8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka				690.000.000,00		701.000.000,00		709.800.000,00		719.396.000,00		733.783.920,00		
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	0	42	690.000.000,00	42	701.000.000,00	42	709.800.000,00	42	719.396.000,00	42	733.783.920,00		
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				302.324.877,00		308.371.375,00		314.538.802,00		320.829.578,00		327.246.170,00		
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	60	65	302.324.877,00	70	308.371.375,00	75	314.538.802,00	80	320.829.578,00	85	327.246.170,00	8.01.0.00.0.00.05.00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				302.324.877,00		308.371.375,00		314.538.802,00		320.829.578,00		327.246.170,00		
Tersusunnya Dokumen program kegiatan teknis Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	0	1	302.324.877,00	1	308.371.375,00	1	314.538.802,00	1	320.829.578,00	1	327.246.170,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	0	4		4		4		6		8			

	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)													
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	0	50		60		70		80		90			
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
8.01.03.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan				226.320.677,00		220.847.091,00		215.264.032,00		209.569.313,00		203.760.700,00		

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET ERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	0	1	226.320.677,00	1	220.847.091,00	1	215.264.032,00	1	209.569.313,00	1	203.760.700,00		
8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	0	50	40.000.000,00	60	50.000.000,00	70	60.000.000,00	80	65.000.000,00	90	70.000.000,00		
8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		27.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	0	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	6	27.000.000,00	8	30.000.000,00		

8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				16.004.200,00		17.524.284,00		19.274.770,00		19.260.265,00		23.485.470,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET ERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	0	1	16.004.200,00	1	17.524.284,00	1	19.274.770,00	1	19.260.265,00	1	23.485.470,00		
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				100.000.000,00		102.000.000,00		104.040.000,00		106.120.800,00		108.243.216,00		
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	80	85	100.000.000,00	90	102.000.000,00	100	104.040.000,00	100	106.120.800,00	100	108.243.216,00	8.01.0.00.0.00.05.00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				100.000.000,00		102.000.000,00		104.040.000,00		106.120.800,00		108.243.216,00		
Tersusnya Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	102.000.000,00	1	104.040.000,00	1	106.120.800,00	1	108.243.216,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	0	50		60		70		80		80			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	0	1		1		1		1		1			

8.01.04.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				7.000.000,00		7.500.000,00		7.800.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	0	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	7.800.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				76.165.400,00		77.548.710,00		78.959.682,00		80.398.900,00		81.866.916,00		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	0	50	76.165.400,00	60	77.548.710,00	70	78.959.682,00	80	80.398.900,00	80	81.866.916,00		

8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	0	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				6.834.600,00		6.951.290,00		7.280.318,00		7.721.900,00		8.376.300,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	0	1	6.834.600,00	1	6.951.290,00	1	7.280.318,00	1	7.721.900,00	1	8.376.300,00		
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				100.000.000,00		102.000.000,00		104.040.000,00		106.120.800,00		108.243.216,00		

Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	65	70	100.000.000,00	80	102.000.000,00	90	104.040.000,00	100	106.120.800,00	100	108.243.216,00	8.01.0.00.0.00.05.00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				100.000.000,00		102.000.000,00		104.040.000,00		106.120.800,00		108.243.216,00		
Tersusunnya dokumen Program kegiatan teknis Bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	102.000.000,00	1	104.040.000,00	1	106.120.800,00	1	108.243.216,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET ERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	0	30		40		50		60		70			
8.01.05.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat				23.500.000,00		23.970.000,00		24.449.200,00		24.877.600,00		25.435.216,00		

Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	0	1	23.500.000,00	1	23.970.000,00	1	24.449.200,00	1	24.877.600,00	1	25.435.216,00		
8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				25.500.000,00		26.010.000,00		26.530.000,00		27.000.000,00		27.600.000,00		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	0	30	25.500.000,00	40	26.010.000,00	50	26.530.000,00	60	27.000.000,00	70	27.600.000,00		

8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				25.500.000,00		26.010.000,00			26.530.000,00		27.000.000,00		27.600.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET ERANGA N	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	0	1	25.500.000,00	1	26.010.000,00	1	26.530.000,00	1	27.000.000,00	1	27.600.000,00			
8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				25.500.000,00		26.010.000,00		26.530.800,00		27.243.200,00		27.608.000,00			

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	0	1	25.500.000,00	1	26.010.000,00	1	26.530.800,00	1	27.243.200,00	1	27.608.000,00		
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				525.394.420,00		535.902.308,00		546.620.355,00		557.552.762,00		568.703.817,00		
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	90	95	525.394.420,00	100	535.902.308,00	100	546.620.355,00	100	557.552.762,00	100	568.703.817,00	8.01.0.00.0.00.05.00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				525.394.420,00		535.902.308,00		546.620.355,00		557.552.762,00		568.703.817,00		
Tersusunnya dokumen Program kegiatan teknis Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	0	4	525.394.420,00	4	535.902.308,00	6	546.620.355,00	6	557.552.762,00	6	568.703.817,00		

	Penanganan Konflik di Daerah (Orang)																			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	0	1												1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1												1		1		1	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET ERANGA N						
			2026		2027		2028		2029		2030									
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU										
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)						

	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	0	50		60		70		80		100		
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
8.01.06.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				45.000.000,00		43.000.000,00		41.920.000,00		40.758.400,00		40.513.568,00	

Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	0	1	45.000.000,00	1	43.000.000,00	1	41.920.000,00	1	40.758.400,00	1	40.513.568,00		
8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				45.394.420,00		51.902.308,00		54.700.355,00		57.794.362,00		57.190.249,00		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	0	50	45.394.420,00	60	51.902.308,00	70	54.700.355,00	80	57.794.362,00	100	57.190.249,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET ERA
			2026	2027	2028	2029	2030							

KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT		TAHUN 2024	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		NGA N
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				145.000.000,00		147.000.000,00		150.000.000,00		153.000.000,00		157.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	0	4	145.000.000,00	4	147.000.000,00	6	150.000.000,00	6	153.000.000,00	6	157.000.000,00		
8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				145.000.000,00		147.000.000,00		150.000.000,00		153.000.000,00		157.000.000,00		

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	0	1	145.000.000,00	1	147.000.000,00	1	150.000.000,00	1	153.000.000,00	1	157.000.000,00		
8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				145.000.000,00		147.000.000,00		150.000.000,00		153.000.000,00		157.000.000,00		
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	145.000.000,00	1	147.000.000,00	1	150.000.000,00	1	153.000.000,00	1	157.000.000,00		

Kesbangpol berperan sebagai "enabler" sosial bagi program-program lintas sektor. Misalnya, dalam penanggulangan kemiskinan, upaya Kesbangpol dalam membangun kohesi sosial dan partisipasi masyarakat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inisiatif pemberdayaan ekonomi. Demikian pula, stabilitas yang dijaga oleh Kesbangpol melalui penanganan konflik dan kewaspadaan nasional adalah prasyarat bagi investasi dan pengembangan pariwisata. Keterlibatan langsung Kesbangpol dalam program GEDSI menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial dan inklusi, yang merupakan fondasi penting bagi harmoni masyarakat. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Kesbangpol tidak beroperasi secara terisolasi, tetapi merupakan bagian integral dari upaya tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan kolaboratif untuk mencapai tujuan pembangunan yang kompleks dan multidimensional.

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol merupakan ukuran keberhasilan tingkat tinggi yang merefleksikan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, serta selaras dengan visi dan misi kepala daerah. IKU ini dipilih dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi dan berlaku untuk periode 2025 hingga 2030. **TABEL 4.4** Sebagai Berikut:

TABEL 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1,	8.01.0.00.0.00.05.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
2,	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	84	84	86,5	89	91,5	94,0	96,5	
3,	Persentase masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	%	72	72	74	76	78	80	82	

IKU Badan Kesbangpol Kabupaten Sigi adalah:

1. **Persentase Tingkat kesadaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.**
2. **Persentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam demokrasi.**

Kedua IKU ini secara langsung mencerminkan sasaran utama Kesbangpol yang telah ditetapkan.¹ Indikator-indikator ini juga memiliki keselarasan yang kuat dengan sasaran RPJMD Kabupaten Sigi, khususnya Sasaran 5.1.12 "Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM".¹ Lebih jauh lagi, IKU ini mendukung Prioritas Nasional 1 RPJMN, yaitu "Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia".¹

Kesesuaian IKU Kesbangpol dengan tujuan strategis di tingkat yang lebih tinggi menunjukkan adanya konsistensi dan koherensi dalam pengukuran kinerja. Hal ini memastikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kesbangpol secara langsung berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional yang lebih luas. IKU ini akan menjadi alat utama bagi pimpinan daerah untuk memantau kemajuan Kesbangpol dan mengevaluasi kontribusinya terhadap visi Kabupaten Sigi. **TABEL 4.4** Sebagai Berikut :

TABEL 4.4
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			

4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kesbangpol

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kesbangpol adalah ukuran keberhasilan yang lebih operasional, menggambarkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.¹ IKK ini berlaku untuk periode 2025 hingga 2030. Berikut

Tabel 4.5 sebagai berikut :

TABEL. 4.5
INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
2	Indeks Demokrasi Indonesia	positif	indeks	84	84	86,5	89	91,5	94,0	96,5	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	
4	Persentase masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	positif	%	72	72	74	76	78	80	82	

Berikut adalah IKK Badan Kesbangpol Kabupaten Sigi:

1. Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

- Target 2025: 0.65; Target 2029: 0.85.¹

2. Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik.

- Target 2025: 0.7; Target 2029: 0.9.¹

3. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif.

- Target 2025: 0.6; Target 2029: 0.8.¹

4. Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan.

- Target 2025: 0.8; Target 2029: 0.92.¹

5. Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan.

- Target 2025: 0.9; Target 2029: 0.98.¹

Ragam IKK ini mencerminkan luasnya mandat dan tanggung jawab operasional Kesbangpol, mulai dari aspek ideologi dan karakter kebangsaan, pendidikan politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan, hingga ketahanan ekonomi-sosial-budaya dan penanganan konflik. Setiap IKK memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas operasional Kesbangpol di berbagai fungsi yang diembannya. Misalnya, target yang sangat tinggi untuk "Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan" (mencapai 0.98 pada 2029) menunjukkan prioritas tinggi dalam penanganan konflik ¹, sementara "Peningkatan cakupan signifikan" untuk penguatan Pancasila mengindikasikan ambisi untuk dampak yang luas.¹ IKK ini akan menjadi panduan bagi unit-unit kerja di Kesbangpol untuk merencanakan kegiatan harian, mengalokasikan sumber daya, dan memantau kemajuan secara terperinci.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif, dirancang untuk menjadi pedoman utama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Sigi yang berlandaskan Pancasila, demokratis, dan harmonis dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Renstra ini secara cermat telah mengintegrasikan Prioritas Nasional dari RPJMN, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Sigi, serta tugas dan fungsi spesifik Kesbangpol.

Penyusunan Renstra ini menunjukkan komitmen Kesbangpol untuk berkontribusi pada fondasi sosial dan politik yang kokoh, yang merupakan prasyarat bagi keberhasilan visi Kabupaten Sigi "MAJU, BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA".¹ Melalui program-program seperti penguatan ideologi Pancasila, pendidikan politik, pemberdayaan ormas, pembinaan ketahanan sosial-ekonomi-budaya, dan penanganan konflik sosial, Kesbangpol secara langsung mendukung stabilitas internal dan partisipasi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa peran Kesbangpol tidak hanya terbatas pada aspek politik, tetapi juga meluas ke dimensi pembangunan manusia dan sosial yang lebih luas, termasuk dukungannya terhadap program lintas sektor seperti Pengarusutamaan GEDSI.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 akan berpegang teguh pada kaidah-kaidah perencanaan pembangunan daerah yang diamanatkan. Prinsip-prinsip ini meliputi

¹:

1. **Transparan:** Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi akan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik.
2. **Responsif:** Program dan kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang.
3. **Efisien dan Efektif:** Pemanfaatan sumber daya akan dioptimalkan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal.
4. **Akuntabel:** Setiap tindakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
5. **Partisipatif:** Melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pelaksanaan.
6. **Terukur:** Kinerja akan diukur berdasarkan indikator yang jelas dan target yang spesifik.
7. **Berkeadilan:** Memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
8. **Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan:** Mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Kaidah-kaidah ini akan menjadi panduan moral dan operasional bagi seluruh jajaran Kesbangpol dalam menjalankan tugasnya.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Sigi akan disertai dengan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan.¹

Mekanisme ini meliputi:

1. **Pemantauan Rutin:** Pemantauan berkala terhadap kemajuan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan akan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi hambatan atau penyimpangan dari rencana.
2. **Evaluasi Kinerja Tahunan:** Evaluasi tahunan akan dilakukan untuk menilai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kesbangpol. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk penyesuaian strategi dan program di tahun berikutnya.
3. **Reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP):** Rancangan akhir Renstra PD akan direviu oleh APIP untuk memastikan konsistensi, keselarasan dengan peraturan, dan akuntabilitas.¹ Reviu ini juga akan memastikan keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja Renstra PD dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD.¹
4. **Laporan Berkala:** Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan Renstra secara berkala kepada pimpinan daerah dan pemangku kepentingan terkait.
5. **Forum Evaluasi Partisipatif:** Melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam forum evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dan masukan yang konstruktif.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi ini bukan hanya sekadar pemenuhan kepatuhan, tetapi merupakan proses pembelajaran berkelanjutan. Dengan memantau dan mengevaluasi secara sistematis, Kesbangpol dapat mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan, belajar dari pengalaman, dan menyesuaikan strategi untuk memastikan pencapaian tujuan jangka panjang. Hal ini akan memungkinkan Kesbangpol untuk terus meningkatkan efektivitasnya dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, sehingga kontribusinya terhadap pembangunan Kabupaten Sigi tetap relevan dan optimal.



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIGI

